

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

## 1. Identifikasi Perkembangan Harga

Perkembangan harga bahan kebutuhan pokok penting (bapokting), barang lainnya, dan jasa di Kabupaten Ciamis pada Triwulan I 2025 secara umum menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi harga seiring dengan faktor musiman, permintaan hari besar, serta dinamika pasokan dari daerah pemasok.

Sebagai daerah non-IHK, pemantauan inflasi Kabupaten Ciamis mengacu pada **Indeks Perkembangan Harga (IPH)**, dengan **IHK Kota Tasikmalaya** digunakan sebagai indikator proksi regional Priangan Timur serta **inflasi Provinsi Jawa Barat** sebagai pembanding makro.

Pada Juli 2025, IPH Kabupaten Ciamis secara konsisten berada pada zona deflasi. IPH tercatat sebesar -0,88% pada Minggu I, kemudian deflasi berlanjut meskipun dengan intensitas yang semakin menurun menjadi -0,64% pada Minggu II, -0,39% pada Minggu III, dan -0,23% pada Minggu IV. Pada Minggu V, IPH kembali tercatat deflasi sebesar -0,31%.

Kondisi deflasi yang terjadi sepanjang bulan Juli mencerminkan **terjaganya pasokan dan stabilitas harga** di tingkat pasar, khususnya pada komoditas bahan pangan pokok. Deflasi yang semakin melandai menunjukkan bahwa tekanan harga relatif rendah dan tidak terdapat gangguan pasokan yang signifikan selama periode tersebut.

Memasuki bulan Agustus 2025, IPH Kabupaten Ciamis masih menunjukkan dinamika harga yang terkendali. Pada Minggu I, IPH tercatat relatif stabil dengan sedikit inflasi sebesar 0,02%, sebelum kembali mengalami deflasi pada minggu-minggu berikutnya.

Deflasi IPH tercatat sebesar -0,16% pada Minggu II, kemudian berlanjut menjadi -0,23% pada Minggu III dan -0,30% pada Minggu IV. Penurunan IPH tersebut sejalan dengan membaiknya pasokan komoditas pangan, khususnya komoditas hortikultura, serta efektivitas distribusi antar wilayah.

Kondisi ini mencerminkan bahwa tekanan inflasi pada bulan Agustus 2025 relatif rendah dan dapat diredam melalui ketersediaan pasokan yang memadai serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah..

Pada bulan September 2025, perkembangan IPH Kabupaten Ciamis menunjukkan perubahan arah pergerakan harga. Pada Minggu I, IPH tercatat deflasi sebesar -0,83%, mencerminkan masih terjaganya stabilitas harga di awal bulan.

Namun demikian, pada minggu-minggu berikutnya mulai muncul tekanan inflasi, dengan IPH meningkat menjadi 0,58% pada Minggu II, 0,76% pada Minggu III, dan mencapai 0,99% pada Minggu IV. Kenaikan IPH ini mengindikasikan adanya peningkatan permintaan masyarakat serta mulai terbatasnya pasokan pada beberapa komoditas pangan strategis.

Meskipun demikian, tekanan inflasi yang terjadi pada bulan September masih berada dalam

kisaran yang terkendali dan belum menunjukkan lonjakan harga yang signifikan.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

### 1. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan TPID, terdapat beberapa permasalahan utama yang memengaruhi efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis selama Triwulan III Tahun 2025, yaitu:

#### 1. Ketidakstabilan Pasokan Komoditas Pangan Strategis

Fluktuasi pasokan komoditas pangan strategis, khususnya telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah, masih menjadi sumber tekanan inflasi. Kenaikan biaya pakan ternak berdampak pada harga produk unggas, sementara gangguan cuaca dan tertundanya masa panen membatasi pasokan hortikultura. Selain itu, keterbatasan suplai livebird pasca periode oversupply sebelumnya turut memengaruhi dinamika harga daging ayam ras.

#### 2. Kendala Distribusi dan Biaya Logistik

Distribusi pangan dari sentra produksi ke pasar di Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal. Hambatan distribusi dan peningkatan biaya logistik turut mendorong kenaikan harga, khususnya pada komoditas hortikultura, meskipun secara nasional beberapa komoditas berada pada kondisi surplus. Kondisi ini berpotensi memperlebar disparitas harga antar wilayah dan memperlambat penyesuaian harga di tingkat konsumen.

#### 3. Tekanan Permintaan Musiman dan Perubahan Pola Konsumsi

Peningkatan permintaan musiman, terutama pada awal tahun ajaran baru dan periode pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), memberikan tekanan tambahan terhadap harga. Kenaikan tarif jasa pendidikan, termasuk bimbingan belajar dan biaya pendidikan formal SD-SMA, serta meningkatnya permintaan produk sandang seperti baju muslim wanita, mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berdampak pada inflasi kelompok inti.

#### 4. Dampak Penyesuaian Harga Administered Prices

Tekanan inflasi juga bersumber dari kelompok Administered Prices, terutama akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi dan rokok (SKM dan SKT). Penyesuaian harga tersebut dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah dunia, nilai tukar, serta kebijakan Harga Jual Eceran (HJE) rokok, yang berdampak langsung terhadap harga di tingkat konsumen.

#### 5. Risiko Tekanan Harga pada Akhir Triwulan

Pada akhir Triwulan III, tekanan inflasi kembali meningkat seiring kenaikan permintaan dan keterbatasan pasokan, khususnya pada komoditas Volatile Food. Implementasi Program

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan pada September 2025 turut memengaruhi ketersediaan daging ayam ras di pasar. Kondisi ini menuntut langkah antisipatif yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas harga pada periode selanjutnya.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### 1. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

TPID Kabupaten Ciamis melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi yang terintegrasi dalam kerangka 4K sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga
  1. Pemantauan harga harian di pasar utama.
  2. Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
  3. Penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Ketersediaan Pasokan
  1. Pengelolaan stok pangan bersama Bulog.
  2. Dukungan sektor pertanian melalui bantuan sarana produksi dan perbaikan irigasi.
  3. Penyaluran Beras SPHP hingga Maret 2025.
  4. Fasilitasi akses pembiayaan (KUR dan resi gudang).
3. Kelancaran Distribusi
  1. Monitoring distribusi oleh Satgas Pangan.
  2. Perbaikan infrastruktur jalan menuju sentra produksi.
  3. Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Garut (Februari 2025).
4. Komunikasi Efektif
  1. Rapat koordinasi TPID secara berkala.
  2. Partisipasi aktif dalam rapat koordinasi pusat dan regional.

### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

#### 1. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah

##### 2. Capaian Positif:

1. Inflasi Provinsi Jawa Barat tetap terkendali di bawah target.
2. Penurunan harga cabai merah menunjukkan perbaikan pasokan.
3. Pemanfaatan sistem pemantauan harga (SILINDA JABAR) semakin mendukung pengambilan kebijakan.

##### 3. Area Perbaikan:

1. Konsistensi dan kelengkapan data harga.
2. Efektivitas intervensi pasar pada komoditas tertentu.
3. Penguatan mitigasi risiko defisit pangan.

### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## **1. Rekomendasi Kebijakan:**

1. Penguatan Ketahanan Pasokan Komoditas Volatile Food (VF) melalui peningkatan koordinasi TPID dalam memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis, khususnya daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah, termasuk antisipasi peningkatan permintaan pada periode tertentu serta dampak implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Optimalisasi Kelancaran Distribusi dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga stabilitas harga komoditas hortikultura dan pangan strategis, melalui pemetaan jalur distribusi utama, penguatan konektivitas dengan daerah sentra produksi, serta percepatan distribusi pada saat terjadi gangguan pasokan.
3. Penguatan Pengawasan Harga dan Ketersediaan Barang di Pasar, khususnya terhadap komoditas pangan strategis dan administered prices, melalui intensifikasi pemantauan pasar, pengendalian potensi spekulasi, serta sinergi dengan aparat penegak hukum guna menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
4. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Pengendalian Inflasi, melalui penyampaian informasi harga dan pasokan secara konsisten kepada masyarakat, optimalisasi peran perangkat daerah, BUMD, dan BUMDes dalam mendukung stabilisasi harga, serta pemanfaatan anggaran daerah secara efektif dan tepat sasaran untuk intervensi pengendalian inflasi.